

Kewajiban mengembalikan uang dalam perjanjian tidak halal studi kasus putusan mahkamah agung no 3038 k pdt 2009 = Restitution obligation in a null contract case study on supreme court decision no 3038 k pdt 2009

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20402369&lokasi=lokal>

Abstrak

[Skripsi ini membahas mengenai konsekuensi ketidakabsahan perjanjian pada sengketa dalam Putusan MA No. 3038/K/Pdt/2009, dimana para pihak melakukan perjanjian kerja sama untuk menyuap Kementerian Pendayaan Aparatur Negara demi memfasilitasi kelulusan Pegawai Honorer Nangroe Aceh Darussalam untuk menjadi Pegawai Negeri. Oleh karena itu perjanjian ini mempunyai status batal demi hukum, karena tidak terpenuhinya Pasal 1320 angka 4 mengenai sebab yang halal. Dengan batalnya perjanjian, berlakulah Pasal 1359 ayat (1) KUHPerdara, dimana segala pembayaran yang dilakukan para pihak dapat dituntut kembali karena merupakan suatu pembayaran tanpa kewajiban. Dengan demikian, putusan ini telah memenuhi ketentuan KUHPerdara. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan menggunakan metode studi kepustakaan, This thesis discusses the problems of a null contract due to invalidity of the contract by using case study of Supreme Court Decision Number 3038/K/Pdt/2009, in which the parties arranged an agreement to bribe the State Ministry for the Empowerment of State Apparatus in order to appoint Termporary Employees of local government Nangroe Aceh Darussalam as permanent state apparatus. Due to unfulfillment of contract requirement regulated in Art. 1320 point 4 regarding permitted cause, this agreement between the parties is nulled. Therefore, Art 1359 verse (1) Indonesian Civil Code where the performing party on the basis of a null contract can demand restitution because of undue performance, is applied. Thus, this supreme court decision has complied the Indonesian Civil Code Regulation. This research is a juridical normative research using literature study method.]